

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KANTOR LURAH TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN KEPRI

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

NURUL SYAFITRI

175310482

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : NURUL SYAFITRI
NPM : 175310482
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KANTOR LURAH TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN KEPRI

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 30 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Desember 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KANTOR LURAH TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN KEPRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 09 Desember 2021

Yang memberi pernyataan,

NURUL SYAFITRI

175310482

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan wawancara langsung dan dokumentasi. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Terdapat permasalahan pertama yang ditemukan yaitu pertama Kantor Lurah Teluk Uma tidak membuat laporan arus kas. Kedua tidak menghitung jumlah penyusutan pada setiap aset tetap. Ketiga tidak menyajikan terhadap nilai aset tetap. Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan

ABSTRACT

This research was conducted at the Teluk Uma Village Head Office, Tebing District, Karimun Regency Kepri. The purpose of this study was to determine whether the application of accounting at the Teluk Uma Village Head Office, Tebing District, Karimun Regency Kepri is in accordance with government accounting standards.

The data used are primary and secondary data, while the data collection techniques used in the author are direct interviews and documentation. In the preparation of this study the author uses a qualitative descriptive method.

The first problem found was that Teluk Uma Village head Office did not make a cash flow report. The second does not calculate the amount of depreciation on each asset. The third does not present the value of assets. After conducting this research it can be concluded that the application of accounting at the Teluk Uma Village Head Office, Tebing District, Karimun Regency Kepri is not in accordance with government accounting standards.

Keywords : *Application of Accounting, Regional Financial Management, Government Accounting Standards*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah AWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia , nikmat serta kasih sayang-Nya dan hidah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KANTOR LURAH TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN”**, guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan serta saran dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungannya. Dengan izin ini penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku rector Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan pada penulis agar bisa menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Eva Sunandri,SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Bapak Burhanudin, SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses penelitian yaitu Bapak Lurah, Bapak Sekretaris Lurah, Staf Lurah dan terkhusus untuk kakak yenny marisa selaku bendahara yang telah mengizinkan dan bersedia membantu, memberikan data yang diperlukan sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua , Ayahanda Tersayang (Sufrizal) dan Ibunda Tercinta (Ros Naini) serta keluarga besar yang memberikan dukungan tanpa henti moril maupun material . sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kakak saya tercinta Rike Yuri Arindi dan abang ipar yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis.
9. *Especially for my man honey* Tengku Shafiq Aldo yang telah memberikan dukungan, cinta, kepercayaan dan doa tanpa henti. *Stay with me and I Love you so much.*
10. Terima kasih kepada Ciwi Banana always bar-bar dan tukang ngegas (maulaya, sawita, okta, riola, maria, rika) teman rasa saudara sendiri yang

selama ini telah menjadi bagian dari cerita kuliahku dari semester satu sampai semester akhir yang selalu ada menghibur, mengingatkan untuk bersabar dan mengingatkan dalam hal kebaikan, memberikan rasa susah, sedih dan kesenangan dalam berbagai cerita-cerita yang gila, teman dalam segala hal. Terima kasih kalian sudah menjadi skenario Allah SWT yang diberikan dalam hidupku, mengenal kalian selama 4 tahun takakan pernah bosan dalam ingatan. Semoga kita berteman dipertemuan lagi dimasa depan dalam keadaan sehat dan jauh lebih baik lagi .Amin.

11. Serta seluruh pihak yang telah mengarahkan dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan kerja samanya, Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin ya robbal'alamiin.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis

NURUL SYAFITRI

175310482

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	11
2.1 Telaah Pustaka	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi	11
2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	11
2.1.3 Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah	13
2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
2.1.5 Perbedaan antara Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan.....	14
2.1.6 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah di Dalam Akuntansi	15
2.1.7 Unsur Laporan Keuangan Daerah	16
2.1.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77Tahun 2020	17
2.1.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2010	20

	2.1.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013	21
	2.2 Hipotesis	22
BAB III	: METODE PENELITIAN	23
	3.1 Desain Penelitian	23
	3.2 Objek Penelitian	23
	3.3 Jenis dan Sumber Data	23
	3.4 Teknik dan Pengumpulan Data	24
	3.5 Teknik Analisis Data	24
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
	4.1 Gambaran Umum Kantor Lurah Teluk Uma	25
	4.1.1 Sejarah Singkat Kelurahan Teluk Uma	25
	4.1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Teluk Uma	26
	4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	28
	4.2.1 Dasar Pencatatan	28
	4.2.2 Proses Akuntansi	28
	4.2.3 Laporan Keuangan	37
BAB V	: SIMPULAN DAN SARAN	41
	5.1 Simpulan	41
	5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel 4.2	Buku Kas Umum Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri	30
Tabel 4.3	Buku Besar Kas di Bendahara	30
Tabel 4.4	Buku Besar Pendapatan Transfer	30
Tabel 4.5	Buku Besar Belanja Pegawai	31
Tabel 4.6	Buku Besar Belanja Operasional	31
Tabel 4.7	Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran	31
Tabel 4.8	Neraca Saldo	32
Tabel 4.9	Jurnal Penyesuaian Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri	36
Tabel 4.10	Neraca Saldo	38
Tabel 4.11	Laporan Realisasi Pelaksanaan	39
Tabel 4.12	Laporan Perubahan Ekuitas	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Teluk Uma26



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Pelaksanaan 2018-2019
- Lampiran 2 : Laporan Neraca 2018-2019
- Lampiran 3 : Laporan Buku Kas Umum
- Lampiran 4 : Laporan Perubahan Ekuitas 2018-2019
- Lampiran 5 : Nota Dinas 2018-2019
- Lampiran 6 : Struktur Organisasi
- Lampiran 7 : Standar Operasioanl Prosedur
- Lampiran 8 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satuan tahun.

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan

keuangan adalah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan Negara. Adapun pengertian dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasar dan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara priodik (SAP 2016).

Pemerintah selanjutnya mengamati tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu Komite Standar Independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang Keuangan Negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan belanja, yang berbunyi sebagai berikut : ketentuan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71

Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis AkruaI sesuai ketentuan dalam PP nomor 71 Tahun 2010 dimana Terdapat 2 buah lampiran, Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI yang berlaku sejak tanggal dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akruaI yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akruaI hingga tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun (Watubun, 2017).

Hasil dari akuntansi adalah pelaporan keuangan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*) berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintah. Pencatatan itu mencakup administrasi keuangan Negara, pelaporan, dan pengontrolan anggaran.

Kantor Lurah Teluk Uma adalah wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Karimun yang berada di Kecamatan Tebing. Penghasilan ekonomi penduduk Kelurahan Teluk Uma sebagian besarnya yaitu nelayan, pedagang dan pegawai negeri sipil.

Dasar pencatatan pada Kantor Lurah Teluk Uma yaitu menggunakan basis kas (Cash Basis), dimana transaksi ekonomi entitas Kantor Lurah Teluk Uma diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan.

Proses akuntansi yang ada dikantor lurah teluk uma dimulai dari membuat Buku Kas Umum (BKU) mencatat seluruh transaksi baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang bersifat tunai kemudian dicatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Dimana Buku Kas Umum (BKU) hanya dipegang oleh satu orang yaitu bendahara..Selanjutnya membuat neraca saldo dan neraca saldo pada Kantor Lurah Teluk Uma dibuat per tahun yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Lurah Teluk Uma. Setelah itu dilanjutkan membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)dalam penyusunan LRA pada Kantor Lurah Teluk Uma mencakup unsur-unsur yang terdiri dari sebagai berikut: belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin.

Neraca merupakan bagian dari sebuah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam penyusunan neraca pada Kantor Lurah Teluk Uma mencakup unsur yang terdiri dari aset lancar terdiri atas kas. Sedangkan aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, untuk penyusutan aset tetap Kantor Lurah Teluk Uma menggunakan metode garis lurus dan menafsirkan umur ekonomisnya selama lima tahun untuk penyusutan peralatan dan mesin, dua puluh tahun untuk penyusutan gedung dan bangunan. Aset lainnya terdiri dari aset lain-lain. Kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek seperti utang jangka pendek. Ekuitas dana terdiri dari ekuias.

Selanjutnya Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pada Kantor Lurah Teluk Uma menyediakan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusutan laporan perubahan ekuitas mencakup unsur-unsur terdiri dari ekuuitas awal, surplus/deficit-Lo, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah pertama yang penulis temukan disini yaitu Kantor Lurah Teluk Uma tidak membuat laporan arus kas, seharusnya dalam Standar Akuntansi Pemerintah harus memiliki laporan arus yang dijelaskan pada peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP 03, pernyataan standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut perundang-undangan menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib

menyusun laporan arus kas . Akibatnya sulit mengetahui informasi tentang kas dan juga tidak bisa membandingkan tentang laporan arus kas tahun ini dan tahun sebelumnya.

Masalah yang kedua yang ada didalam Kantor Lurah yaitu tidak membuat jurnal standar satuan kerja perangkat daerah. Dalam melakukan akuntansi anggaran, SKPD diperbolehkan tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran. Namun demikian, prosedur pengganti tersebut harus dikelola dalam sebuah sistem sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam buku besar (sebagai header), neraca saldo, dan laporan realisasi anggaran.

Masalah yang ketiga yaitu Kantor Lurah Teluk Uma tidak menghitung jumlah penyusutan setiap aset seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. Karena tidak menghitung jumlah penyusutan maka pada bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp 0.

Masalah yang keempat yaitu Neraca Kantor Lurah Teluk uma total di Kewajiban dan Ekuitas Dana 0 (Nol) seharusnya sama totalnya dengan total aset. Dan angka-angka yang ada di Laporan Perubahan Ekuitas seharusnya ada dineraca.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, di atas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian yaitu :

Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kantor Lurah Teluk Uma sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Kantor Lurah Teluk Uma, bisa menjadikan bahan penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penerapan akuntansi di kantor lurah.
- b. Bagi penulis, untuk meningkatkan wawasan dalam penerapan akuntansi.
- c. Bagi penelitian, bisa menjadi acuan dan referensi dalam penelitian sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam proposal sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematik penulisan.

Bab II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi kajian tentang konsep atau teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah atau pokok persoalan yang diteliti.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan yang berisikan objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data , teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari Kantor Lurah , hasil penelitian dan pembasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas simpulan dan keterbatasan dari peneliti yang dilakukan, serta saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Sasongko Catur (2016:2) akuntansi adalah proses atau aktivitas yang menganalisis mencatat, mengklasifikasikan, mengkikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan informasi keuanagan untuk kepentingan para penggunanya.

Definisi Akuntansi menurut *American Accounting Association* (1996) Halim dan Kusufi (2014:36) mengemukakan bahwa :

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini dapat melengkapi penganalisis atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.

Menurut Warren, dkk (2014:3) akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Nordiawan (2012:1) akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Bidang akuntansi mempunyai bidang-bidang kekhususan sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman. Menurut Zakiyudin (2013:7) bidang akuntansi antara lain :

1. Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)
2. Auditing (*auditing*)
3. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)
4. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)
5. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)
6. Penganggaran (*budgeting*)

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan akuntansi merupakan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, serta penginterpresentasikan atas hasilnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

2.1.2. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki atau dikuasai oleh Negara atau pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya Keuangan Negara sama keuangan daerah hanya saja pada keuangan Negara meliputi pengelolaan keuangan saja. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan perencanaan dari anggaran daerah dan ini juga diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang

harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik.

Menurut Abdul Halim (2014:31) mengemukakan bahwa akuntansi keuangan daerah sebagai berikut :

Akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

Seperti keuangan Negara, keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri dari atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah dipisahkan. Keuangan daerah yang dapat dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang investaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah BUMD. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintah daerah agar dapat digunakan secara seragam di seluruh pemerintah daerah.

2.1.3. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa :

Tujuan akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

2.1.4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) definisi sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sisten akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan menurut Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin (2015:76) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Dalam PP 71 Tahun 2010 tersebut disebutkan SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan mneyajikan laporan keuangan pemda. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda di Indonesia. Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka diperlukan adanya sistem akuntansi yang harus dilaksanakan oleh setiap pemda.

2.1.5. Perbedaan antara Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan

Menurut Slamet Sugiri (2014) perbedaan akuntansi keuangan daerah dengan akuntansi perusahaan sebagai berikut :

1. Akuntansi keuangan pemerintah tujuan organisasinya mensejahterakan masyarakat atau *nonprofit motive* . Sedangkan akuntansi perusahaan memaksimalkan keuntungan atau *profit motive*
2. Akuntansi keuangan pemerintah pertanggungjawaban kepada rakyat (publik) dan pemerintah atau parlemen. Sedangkan akuntansi perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan , investor, dan kreditor.
3. Adannya perbedaan mendasar terhadap karakteristik anggaran lebih terbuka untuk publik. Sedangkan perusahaa lebih tertutup untuk public
4. Akuntansi keuangan pemerintah sistem akuntansi menggunakan *cash accounting/* basis kas. Sedangkan akuntansi perusahaan menggunakan *accrual accounting/* basis akrual.
5. Akuntansi keuangan pemerintah memiliki kecenderungan sifat organisasi politis. Sedangkan akuntansi perusahaan organisasi bisnis.

6. Akuntansi keuangan pemerintah kriteria keberhasilan ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Sedangkan akuntansi perusahaan laba atau keuntungan.
7. Akuntansi keuangan pemerintah dasar operasional diluar mekanisme pasar. Sedangkan akuntansi perusahaan berdasarkan mekanisme pasar.
8. Akuntansi keuangan pemerintah sumber pendanaan yaitu pajak, retribusi, hutang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara (negara, daerah dan rakyat). Sedangkan akuntansi perusahaan pembiayaan internal : modal pribadi, laba ditahan, penjualan aset perusahaan. Pembiayaan eksternal : utang bank, pendanaan dari investor, obligasi, penerbitan saham.
9. Akuntansi pemerintah struktur organisasi yaitu birokratis, kaku dan hierarki karena menggunakan dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan akuntansi perusahaan lebih fleksibel, datar, piramida, lintas fungsional karena menyesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pihak manajemen.

2.1.6. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah di Dalam Akuntansi

Menurut Sugianto, (1999) dalam Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:38), akuntansi terdiri dari tiga bidang utama yaitu :

1. Akuntansi Komersial/Perusahaan
 Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut
2. Akuntansi Pemerintah
 Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.
3. Akuntansi Sosial
 Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional. Sebagai contoh adalah Neraca Pembayaran Negara, Rekening Arus Dana, Rekening Pendapatan dan Produksi Nasional, serta Neraca Nasional.

2.1.7. Unsur Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang saling berkepentingan

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 bahwa laporan keuangan terdiri dari :

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode
2. **Neraca**
Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Dalam neraca akan tergambar posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**
Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.
4. **Laporan Operasional (LO)**
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan.
5. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020

Menurut Pemendagri Nomor 12 Tahun 2019 pasal 185 sampai dengan pasal 188, akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, SAPD, dan bagan akun standar (BAS) untuk daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 2) SAPD
- 3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

- 1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagaipanduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- 2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
 - a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP
 - b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP
- d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
- e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 3) Neraca
 - 4) Laporan Operasional
 - 5) Laporan Arus Kas
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.
- d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015. Peraturan ini diharapkan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri dalam Negeri untuk pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta pengiterpresentasian atas hasilnya.

Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dilandasi oleh Kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

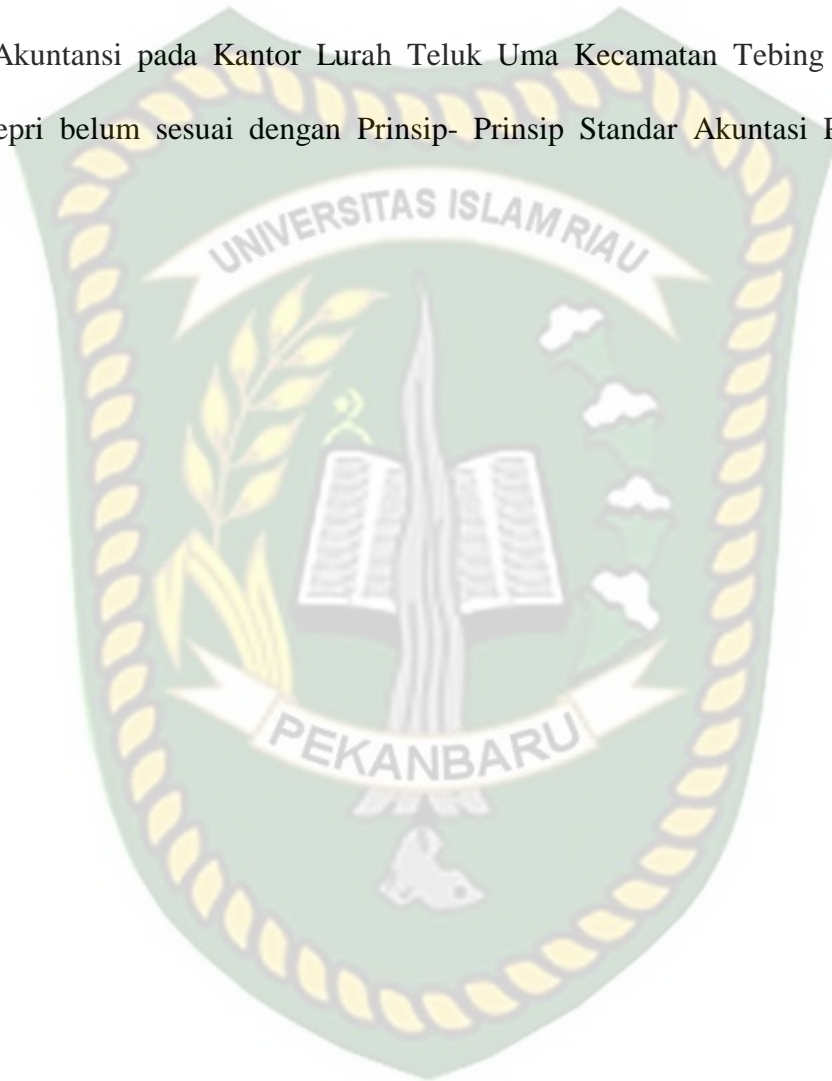
Komponen laporan keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasioanl (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2.1.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Standar ini digunakan untuk pengambilan keputusan, kebijakan akuntansi rujukan dalam proses pembuatan laporan keuangan berbasis akrual.

2.2 HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut ; Penerapan Akuntansi pada Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri belum sesuai dengan Prinsip- Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, saya sebagai penulis menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri

3.3 Jenis dan Sumber data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kepala Lurah dan Karyawan mengenai sejarah berdirinya Kantor Lurah, kebijakan bidang operasional, akuntansi serta keuangan.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tulisan-tulisan dan laporan yang telah disusun kantor lurah dalam bentuk yang sudah jadi berupa struktur organisasi dan lapopran keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data penulis yang diperlukan untuk bahan penulisan ini digunakan sebagai berikut :

1. Wawancara, mengumpulkan data dan informasi secara lisan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung .
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengambilan dokumen-dokumen yang sudah ada dimiliki kantor lurah.

3.5 Teknik analisis data

Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Lurah Teluk Uma

4.1.1. Sejarah Singkat Kelurahan Teluk Uma

Kelurahan Teluk Uma memiliki luas wilayah Konversi : 1 Ha = 10.000 m² atau 1 m² = 0,001 HA yang terdiri dari 7 (Tujuh) Rukun Warga dan 18 (Delapan Belas) Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk Laki – laki 2.672 Jiwa, Perempuan 2.523 Jiwa dengan jumlah Keseluruhan 5.194 Jiwa . Kelurahan Teluk Uma merupakan salah satu dari 5 Kelurahan dan 1 desa di Wilayah Kecamatan Tebing, yang terletak 1 Km ke arah Timur dari kota Kecamatan. Kelurahan Teluk Uma mempunyai luas wilayah seluas 3,5 Km². Terdiri dari : 7 (Tujuh) RW dan 18 (Delapan Belas) RT. Kelurahan Teluk Uma terletak diperbatasan antara lain

1. Sebelah Utara : Laut
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Harjosari
3. Sebelah Timur : Kelurahan Tebing
4. Sebelah Barat : Kelurahan Pamak

Iklim Kelurahan Teluk Uma sebagaimana kelurahan – kelurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing.

Berikut ini jumlah penduduk Kelurahan Teluk Uma berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.1

Jumlah penduduk kelurahan berdasarkan jenis kelamin

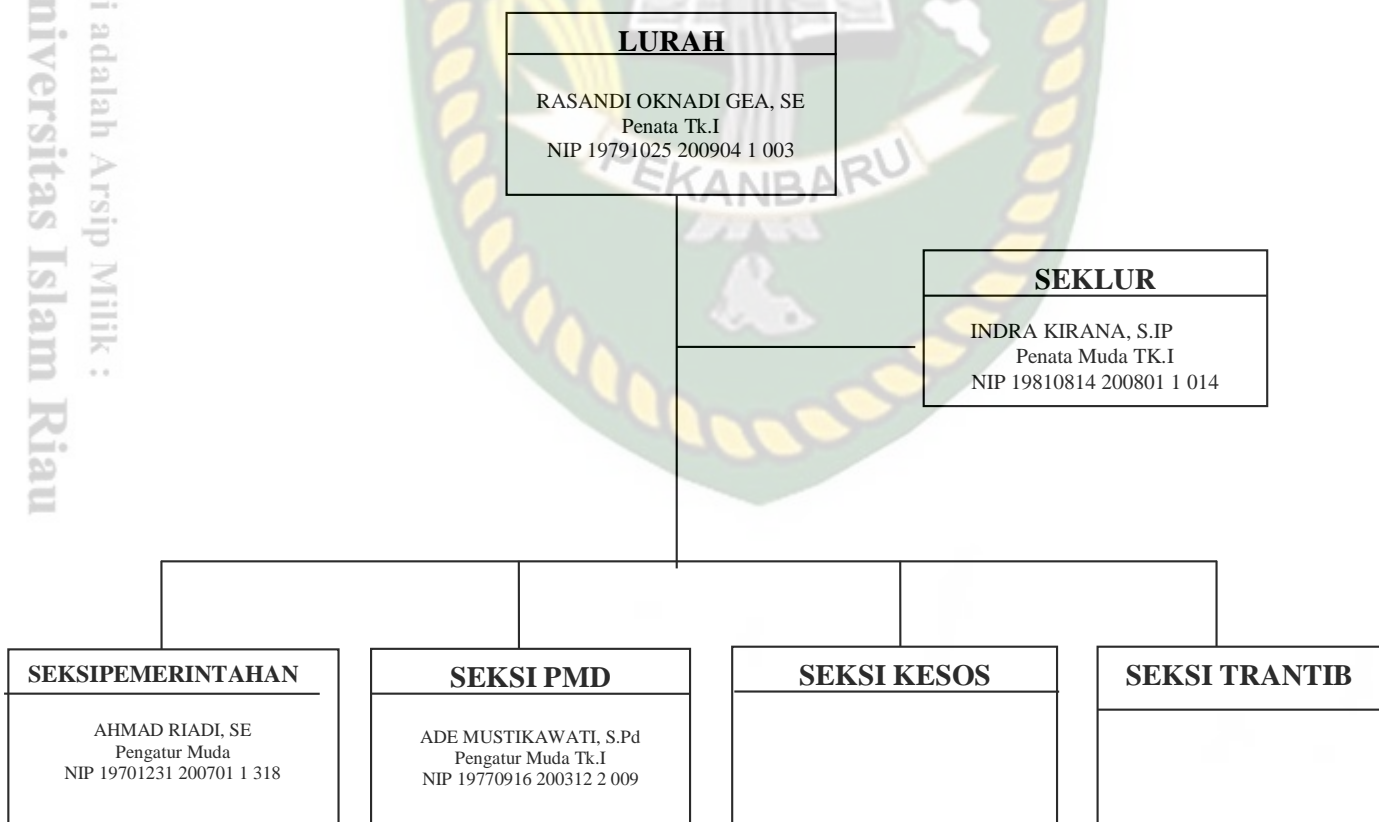
Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total	Jumlah Kepala Keluarga
3.031 Jiwa	2.913 Jiwa	5.936 Jiwa	1.821 Jiwa

Sumber : Kantor Lurah Teluk Uma 2020

4.1.2. Struktur Organisasi Kelurahan Teluk Uma

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, Kelurahan Teluk Uma menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan dengan Pola 4 Kepala Urusan, selengkapnya sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kelurahan Teluk Uma



Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJM Kelurahan) Kelurahan Teluk Uma ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Kelurahan.
 - a. Agar Kelurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan dalam lingkup skala Kelurahan yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Kelurahan Teluk Uma.
 - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Kelurahan Teluk Uma.

2. Manfaat RPJM Kelurahan.
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Kelurahan yang merupakan acuan Pembangunan Kelurahan selama 5 (lima) tahun
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Kelurahan
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Dasar Pencatatan

Dalam sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang digunakan oleh Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri yaitu Basis Kas (*Cash Basis*). Kantor Lurah Teluk Uma melakukan pencatatan dengan menggunakan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali.

4.2.2. Proses Akuntansi

Proses akuntansi yang dilakukan pada Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dilakukan dengan menggunakan sistem. Proses akuntansi ini dimulai mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti kwitansi, formulir penarikan dan penyeteran atau bukti transaksi lainnya.

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi yang selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai. Buku-buku yang digunakan Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepri adalah :

a. Buku Kas Umum

01 Oktober 2018 diterima uang panjar dari bendahara sebesar Rp 10.000.000

02 Oktober 2018 Pembayaran Honorer Pegawai sebesar Rp 2.400.000

10 Oktober 2018 Pembayaran Belanja Opsional alat tulis kantor sebesar Rp
7.000.000

15 Oktober 2018 Pembayaran Belanja makan dan minm sebesar Rp 600.000

Tabel 4.2
Buku Kas Umum
Kantor Lurah Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun Kepri
Tahun Anggaran 2018

No. Urut	Tanggal Kwitansi	No. NTPN (Pajak)	Tanggal Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan Rp.	Pengeluaran Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
				1.1.1.2	Diterima Uang Panjar	10.000.000	
				5.2.1.1.7	Pembayaran honorarium pegawai		2.400.000
					diterima PPh Pasal 21	120.000	
					Disetor PPh pasal 21		120.000
				5.2.2.1.1	Pembayaran Belanja Operasional		7.000.000
					Diterima PPn	636.363	
					Diterima PPh pasal 22	140.000	
					Di setor PPn		636.363.
					Di Setor PPh pasal 22		140.000
				5.2.2.11.1	Pembayaran Belanja makan dan minum		600.00
Jumlah						10.896.363	10.896.363
Jumlah Bulan Oktober 2018						10.896.363	10.896.363
Jumlah sampai bulan lalu						0	0
Jumlah semua s/d Bulan Oktober 2018						10.896.363	10.896.363
Sisa Kas						0	0

Sumber : Buku Kas Umum Kantor Lurah Teluk Uma Kec.Tebing Kab.Karimun Kepri.

2. Tahap Penggolongan

Tahap kedua adalah tahap penggolongan, tahap ini merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti atas transaksi-transaksi melalui kwitansi, kemudian dapat memudahkan untuk menganalisis data. Dengan mengelompokkan bukti transaksi kedalam buku besar berdasarkan nama akun dan dicatat berdasarkan kelompok debit dan kredit.

Tabel 4.3
Buku Besar

Nama : Kas di Bendahara

Tgl	No. akun	Ref	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
						Debit	Kredit
01/10/2018	1.1.1.2		Diterima uang panjar	10.000.000		10.000.000	
02/10/2018	5.2.1.17		Pembayaran hononarium pegawai		2.400.000	7.600.000	
10/10/2018	5.2.2.1.1		Pembayaran belanja operasional		7.000.000	600.000	
15/10/2018	5.2.2.11.1		Pembayaran Belanja makan dan minum		600.000	0	

Sumber :Data Olahan Penulis tahun 2021

Tabel 4.4
Buku Besar

Nama : Pendapatan Transfer

Tgl	No. akun	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	
						Debit	Kredit
01/10/2018	1.1.1.2	Diterima Uang panjar			10.000.000		10.000.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.5
Buku Besar

Nama : Belanja Pegawai

Tgl	No. akun	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	
						Debit	Kredit
02/10/2018	5.2.1.1.7	Pembayaran hononarium pegawai		2.400.000		2.400.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.6
Buku Besar

Nama : Belanja Operasional Kantor

Tgl	No. akun	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	
						Debit	Kredit
10/10/2018	5.2.2.1.1	Pembayaran belanja operasional		7.000.000		7.000.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.7
Buku Besar

Nama : Kas di Bendahara Pengeluaran

Tgl	No. akun	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	
						Debit	Kredit
15/10/2018	5.2.2.11.1	Pembayaran makan dan minum harian		600.000		600.000	

Sumber : Data Olahan 2021

3. Tahap Pengikhtisaran

Selanjutnya yaitu tahap pengikhtisaran dari buku besar ke neraca saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan guna untuk menyakinkan bahwa proses yang dilakukan pencatatannya dengan benar. Kantor Lurah Teluk Uma telah membuat neraca saldo, seperti berikut ini :

Tabel 4.8
Neraca Saldo
Tahun Anggaran 2018

No.	URAIAN	2018
1	ASET	
2		
3	ASER LANCAR	
4	Kas di Kas Daerah	175.000.000
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0
7	Investasi Jangka Pendek	0
8	Piutang Pajak	0
9	Piutang Retribusi	0
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0
13	Bagian Lancar pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0
14	Bagian Lancar tagihan penjualan angsuran	0
15	Bagian lancar tuntutan Ganti Rugi	0
16	Piutang Lainnya	0
17	Persediaan	0
18	Jumlah Aset Lancar	175.000.000
19		
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	
21	Investasi Non permanen	0
22	Pinjaman Jangka Panjang	50.000.000
23	Investasi dalam surat utang Negara	50.000.000
24	Investasi dalam Proyek Pembangunan	50.000.000
25	Investasi Nonpermanen Lainnya	100.000.000
26	Jumlah Investasi Nonpermanen (22 s/d 25)	250.000.000
27	Investasi Permanen	
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0
29	Investasi Permanen Lainnya	0
30	Jumlah Investasi Permanen (28s/d 29)	0
31	Jumlah Investasi Jangka Panjang (26+ 30)	250.000.000
32		
33	ASET TETAP	
34	Tanah	
35	Peralatan dan Mesin	200.000.000
36	Gedung dan Bangunan	150.000.000
37	Jalan, irigasi dan jaringan	300.000.000
38	Aset tetap lainnya	
39	Konturksi dan pengerjaanya	

No.	Uraian	2018
40	Akumulasi penyusutan	0
41	Jumlah aset tetap	650.000.000
42		
43	Dana Cadangan	
44	Dana cadangan	0
45	Jumlah dana cadangan	0
46		0
47	ASET LAINNYA	
48	Tagihan Penjualan Angsuran	0
49	Tuntutan Ganti rugi	0
50	Kemitraan dengan pihak ketiga	0
51	Aset tak berwujud	0
52	Aset lain-lain	0
53	Jumlah aset lainnya	0
54		650.000.000
55	JUMLAH ASET	
57		
58	KEWAJIBAN	
59		
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
62	Utang Bunga	0
63	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	0
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0
66		0
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
68	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan	0
69	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0
70	Utang Jangka Panjang Lainnya	0
71	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0
72		0
73	JUMLAH KEWAJIBAN	0
74		0
75	EKUITAS	
76		
77	EKUITAS	
78	Ekuitas	1.000.000.000
79	Ekuitas SAL	650.000.000
80	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	1.650.000.000
81		
82	EKUITAS DANA INVESTASI	
83	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0
84	Diinvestasikan dalam aset tetap	0
85	Diinvestasikan dalam aset lainnya	0
86	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	0
87	Jumlah ekuitas dana investasi	0
88		
89	EKUITAS DANA CADANGAN	
90	Diinvestasikan dalam dana cadangan	0
91	Jumlah ekuitas dana cadangan	0
92	JUMLAH EKUITAS DANA	0
93	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.650.000.000
94		
95		

Sumber : Data Neraca Saldo Kantor Lurah Teluk Uma Kec.Tebing Kab.Karimun Kepri 2018

4. Penyesuaian

Kantor Lurah Teluk Uma tidak melakukan penyusutan aset-aset tetap, sedangkan standar akuntansi keuangan aset tetap tersebut harus disusutkan. Penyusutan berguna untuk menyajikan nilai aset yang sebenarnya dari aset yang dimiliki oleh Kantor Lurah diakhir periode. Akibatnya dari tidak dibuatnya penyesuaian terhadap aset yang dimiliki Kantor Lurah adalah nilai aset dan ekuitas yang disajikan pada laporan keuangan menjadi lebih tinggi dari nilai yang seharusnya. Karena menggunakan basis kas sebagai dasar pencatatan akumulasi Kantor Lurah Teluk Uma tidak menghitung nilai akumulasi terhadap aset tetap. Seharusnya kantor Lurah Teluk Uma menggunakan dasar pencatatan basis akrual agar bisa membuat jurnal penyesuaian sehingga dapat menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya. Berikut ini beberapa transaksi yang perlu dibuat jurnal penyesuaian.

a. Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan ruang. Aset lancar ialah aset yang dalam periode tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau berbentuk aset lainnya. Aset tidak lancar merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomis, lebih dari setahun. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan dan instalasi.

Aset tetap yang dimiliki Kantor Lurah Teluk Uma adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, jalan, jaringan dan instalasi, dan aset tetap lainnya. Kantor Lurah Teluk Uma tidak melakukan perhitungan beban penyusutan terhadap aset

tetap, hal ini mengakibatkan akun akumulasi penyusutan aset tetap Rp 0. Seharusnya Kantor Lurah Teluk Uma menghitung beban penyusutan aset tetap agar nilai yang disajikan dalam laporan dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus. Berikut ini perhitungan penyusutan yang perlu dibuat Kantor Lurah Teluk Uma:

a. Penyusutan Peralatan dan mesin

Untuk menghitung nilai penyusutan peralatan dan mesin di tahun 2013 sebagai berikut:

Nilai Perolehan : Rp 200.000.000

Umur Ekonomis : 5 Tahun

$$\frac{\text{Rp } 200.000.000}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp } 40.000.000$$

b. Penyusutan Gedung dan Bangunan

Untuk menghitung nilai penyusutan gedung dan bangunan di tahun 2006 sebagai berikut:

Nilai Perolehan : Rp 150.000.000

Umur Ekonomis : 12 tahun

$$\frac{\text{Rp } 150.000.000}{12 \text{ Tahun}} = \text{Rp } 12.500.000$$

c. Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Untuk menghitung nilai penyusutan jalan, jaringan dan instalasi di tahun 2006 sebagai berikut :

Nilai Perolehan : Rp 300.000.000

Umur Ekonomis : 12 Tahun

$\frac{\text{Rp } 300.000.000}{12 \text{ Tahun}} = \text{Rp } 25.000.000$

12 Tahun

Tabel 4.9
Jurnal Penyesuaian
Kantor Lurah Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun Kepri
Tahun Anggaran 2018

Tgl	Uraian	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 des 2018	Beban penyusutan perataan dan mesin Akum. Penyusutan peralatan dan mesin	40.000.000	40.000.000
	Beban penyusutan gedung dan bangunan Akum. Penyusutan gedung dan bangunan	12.500.000	12.500.000
	Beban penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Akum. Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi	25.000.000	25.000.000
	Total	77.500.000	77.500.000

Sumber : Data Olahan Penulis tahun 2021

Seharusnya Kantor Lurah Teluk Uma harus membuat Penyesuaian terlebih dahulu seperti membuat Ayat jurnal Penyesuaian (AJP) Per 31 Desember dan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap seperti : Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan , agar di akhir periode akuntansi nilai aset yang ditampilkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kantor Lurah Teluk Uma juga telah melaporkan aset tetap yang telah dibeli pada tahun 2019. Dapat dilihat pada Neraca pada Tahun 2019 aset tetap yang dilaporkan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya sebesar Rp650.000.000. Maka dari itu perlu dibuat jurnal penyesuaiannya :

Beban Aset Rp 650.000.000

 Aset Tetap Rp 650.000.000

4.2.3. Laporan Keuangan

Pada dasarnya Kantor Lurah Teluk Uma telah membuat laporan keuangannya namun belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Lurah Teluk Uma terdiri dari Neraca, Laporan Operasional atau Kartu Kendali, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada Kantor Lurah Teluk Uma menyajikan aset terdiri aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

Neraca pada Kantor Lurah Teluk Uma formatnya terdiri dari aset lancar yaitu Kas dan persediaan, aset tetap terdiri dari atas tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, serta Kantor Lurah Teluk Uma belum melakukan akumulasi penyusutan terhadap aset tetap. Untuk penyusutan aset tetap Kantor Lurah Teluk Uma menggunakan metode garis lurus dan menafsirkan umur ekonomisnya selama 5 tahun untuk penyusutan peralatan dan mesin, dan 20 tahun untuk penyusutan gedung dan bangunan. Aset lainnya terdiri dari atas aset lain-lain. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek yang terdiri dari atas utang belanja. Ekuitas terdiri dari ekuitas dan ekuitas untuk dikonsolidasikan.

Kantor Lurah Teluk Uma telah membuat Laporan Neraca namun belum sesuai dengan format dan unsur-unsur seperti yang disebutkan didalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010. Berikut ini merupakan contoh neraca saldo yang harus dibuat Kantor Lurah Teluk Uma sesuai dengan Peraturan Pemerintahan :

Tabel 4.10
Neraca Saldo
Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1	Kas dan Bank :		
1.1.1.01	a). Kas di Bendahara Desa	175.000.000	
1.1.1.02	b). Rekening Kas Desa		
1.1.2	Piutang :		
1.1.2.01	a). Piutang Sewa Tanah		
1.1.2.02	b). Piutang Sewa Gedung		
1.1.3	Persediaan :		
1.1.3.01	a). Persediaan Benda Pos dan Materai		
1.1.3.02	b). Persediaan Alat Tulis Kantor		
1.2	Investasi :		
1.2.2	a). Pinjaman jangka panjang	50.000.000	
	b) investasi dlam surat utang negara	50.000.000	
1.3	Aset Tetap :		
1.3.1	a). Tanah		
1.3.2	b). Peralatan dan Mesin	200.000.000	
	c) gedung dan bangunan	150.000.000	
	d) jalan, iritasi dan jaringan	300.000.000	
1.4	Dana Cadangan :		
1.4.1	a). Dana Cadangan		
1.5	Aset Tidak Lancar lainnya :		
1.5.1	a). Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		
1.5.2	b). Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
2.1	Kewajiban Jangka Pendek :		
2.1.3	a). Hutang Pajak		
2.1.4	b). Pendapatan Diterima Dimuka		
3	Ekuitas :		
3.1.1	a). Ekuitas		1.000.000.000
3.1.2	b). Ekuitas SAL		650.000.000
JUMLAH		925.000.000	1.6500.000.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

b. Laporan Realisasi Pelaksanaan

Laporan Realisasi Pelaksanaan adalah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam suatu periode pelaporan.

Kantor Lurah Teluk Uma telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan atau Kartu Kendali yang mana seharusnya sesuai dengan format dan unsur-unsur seperti yang disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 4.11
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Tahun Anggaran 2018

No Urut	KODE REKENING					PAGU ANGGARAN KEGIATAN (Rp)		Uraian	REALISASI KEGIATAN (SP2D) (Rp)		SISA PAGU ANGGAR AN (Rp)
						UP/GU/ TU	L S		UP/GU/ TU	L S	
1	2					3		4	5		6
1	5	2	1	0	0	3,600, 000	0	Honorarium Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	0	0	3.600, 000
2	5	2	1	0	0	23.600 ,000	0	Honorarium Pegawai/Pegawai Tetap/Tidak Tetap	9.800, 000	0	13,600 ,000
3	5	2	2	0	0	12,000 ,000	0	Belanja Alat Tulis Kantor	7,000, 000	0	700,00 0
4	5	2	2	0	0	1,800, 000	0	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	700,00 0	0	1.100, 000
5	5	2	2	0	0	1.400, 000	0	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	0	0	1,400, 000
6	5	2	2	0	0	8,460, 000	0	Belanja Listrik	0	0	8,460, 000
7	5	2	2	0	0	3,000, 000	0	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,280, 000	0	720,00 0
8	5	2	2	0	0	5,220, 000	0	Belanja Kawat/Faksimili/I nternet/TV Kabel/TV Satelit	3,850, 000	0	1,370, 000
9	5	2	2	0	0	1,500, 000	0	Belanja Penggantian Suku	1,000, 000	0	500,00 0

								Cadang Kendaraan Bermotor			
10	5	2	2	0 1	0 6	12,000, 000	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,000, 000	0	5,000, 000
11	5	2	2	0 5	0 5	300,00 0	0	Belanja Pajak kendaraan Bermotor	0	0	300,00 0
12	5	2	2	0 6	0 1	2,100, 000	0	Belanja Cetak	700,00 0	0	1,400, 000
13	5	2	2	0 6	0 2	3,500, 500	0	Belanja Penggandaan (Foto Copy)	3,000, 000	0	0
14	5	2	2	1 1	0 1	4,200, 000	0	Belanja Makanan dan Minuman Harian	3,020, 000	0	1,180, 000
15	5	2	2	1 1	0 4	4,500, 000	0	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,500, 000	0	0
16	5	2	2	1 3	0 2	15,000 000	0	Belanja Pakaian seragam Kegiatan (MTQ)	15,000 000	0	0
17	5	2	2	1 5	0 2	20,000 000	0	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,678 000	0	7,322, 000
18	5	2	2	2 0	1 4	1,500, 000	0	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel/Bermesin	0	0	1,500, 000
19	5	2	2	2 9	0 2	7,000, 000	0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	1,800, 000	0	6,600, 000
Jumlah						75,000 000	0		63,228 900	0	61,052 000

Sumber : Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Kantor Lurah Teluk Uma Kec.Tebing Kab.Karimun Kepri

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yaitu menyajikan informasi sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya, surplus / deficit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang berlangsung menambah atau mengurangi

ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif disebabkan oleh perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar misalnya :

1. Koreksi nilai persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat oleh Kantor Lurah Teluk Uma terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, ekuitas akhir.

Kantor Lurah Teluk Uma telah membuat Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berikut contoh Laporan Perubahan Ekuitas :

Tabel 4.12
Laporan Perubahan Ekuitas
Tahun anggaran 2018

No	Uraian	2018
1	Ekuitas Awal	1.000.000.000
2	Surplus/Defisit Operasional-LO	950.000.000
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar	
4	Koreksi nilai persediaan	500.000.000
5	Selisih revaluasi aset tetap	300.000.000
6	Lain-lain	500.000.000
7	Ekuitas Akhir	650.000.000

Sumber : Data Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Lurah Teluk Uma Kec.Tebing Kab.Karimun Kepri 2018

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya . maka bab ini penulis akan menarik simpulan dan memberi saran agar dapat manfaat bagi instansi dan menjalankan aktivitasnya.

5.1 Simpulan

1. Kantor Lurah Teluk Uma tidak membuat Laporan Arus Kas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah wajib membuat Laporan Arus Kas.
2. Untuk menyusun Laporan nya , Kantor Lurah Teluk Uma tidak menghitung penyusutan aset tetap dan penyesuaian persediaan yang dimiliki oleh Kantor Lurah tersebut.
3. Didalam Peraturan Pemerintah Penerapan Akuntansi Kantor Lurah Teluk Uma belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi instansi yaitu :

1. Seharusnya Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Teebing Kabupaten Karimun membuat Laporan Arus Kas
2. Sebaiknya dalam menyusun laporan keuangan pada Kantor Lurah Teluk Uma Kecamatan Teebing Kabupaten Karimun seharusnya dimulai membuat jurnal umum, posting ke buku besar ,membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan dan melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk sebagai bahan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi peneliti lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual* . Penerbit Brama Ardian .
- Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Pertama. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta : Salemba Empat .
- Marpaung, Ade Alvionata. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (Kantor Camat)*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau .
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat .
- Ningsih, Fitri. (2013). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Pada Kantor Camat Pengdalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Univesitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nordiawan. 2012. *Akuntansi Sektor Publik . Edisi Kedua*. Jakarta:Salemba Empat.
- Sasongko, Catur. (2016). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat .
- Slamet Sugiri Sodikin, B.A. (2014). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Warren, Carl S. (2014). *Accounting Indonesia Adaption* . Jakarta : Salemba Empat.
- Zakiyudin, Ais . (2013). *Akuntansi Tingkat Dasar Dilengkapi dengan akuntansi bagi organisasi pengelola zakat.*, jakarta : Mitra Wacana Media .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 . *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau